

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci)

ARTIKEL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



OLEH:

AGUM GUMELAR

2012/1207141

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kerinci)

Oleh :

Agum Gumelar
1207141/2012

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 27 Juli 2017

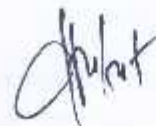
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP: 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Mavar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP: 19840113 200912 2 005

ABSTRAK

Agum Gumelar (1207141/2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci*)

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Kerinci yaitu sebanyak 24 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (sig 0,000). Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci :Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

The aimed of this study to examined the quality of human resources, government accounting standard and the internal control system to the quality of local government financial statements. The population in this study was all SKPD in Kerinci regency as many as 24 SKPD. The sample in this study used a sampling technique total sampling. Analyses were performed using multiple regression models. These results indicated that the quality of human resources and government accounting standard positive significant effect on the quality of local government financial statements (sig 0.000). Internal control system does not affect the quality of local government financial statements.

Keyword : quality of human resources, government accounting standard, internal control system, the quality of local government financial statements.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sector publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Febriady (2013), Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008).

Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (Nasution, 2007).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 memang sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tetapi masih terdapat beberapa kelemahan di Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: Pencatatan nilai Persediaan pada tiga SKPD sebesar Rp. 2,65 miliar tidak akurat, Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan pengamanan administrasi dan fisik atas empat bidang aset tetap tanah seluas 12.030 m² tidak sesuai pedoman pengelolaan BMD dan enam unit bangunan kantor sebesar Rp. 36,93 miliar belum dimanfaatkan. Selanjutnya, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: Pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 549,09 juta pada 11 SKPD tidak sesuai dengan peraturan Bupati, Kurang Volume atas 32 paket belanja pekerjaan sebesar Rp. 1,18 miliar dan lebih bayar harga satuan timpang sebesar Rp. 84,57 juta pada Dinas Pekerjaan Umum, Belanja barang pada enam SKPD melebihi standar dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp. 112,49 juta (www.kerincikab.go.id).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kerinci)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, Penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, Sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3. Bagi akademik, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk penelitian yang lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya.

KAJIAN TEORI

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa

dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009).

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang harus dilihat dalam instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, professional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Widodo (2001) dalam Galuh (2012) menjelaskan sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup

pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegunaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana terungkap didalam Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a. Lingkungan operasional organisasi berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
- b. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - c. Adanya pengaruh proses politik

- d. Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah

2. Ciri keuangan yang penting bagi pengendalian

- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian
- b. Investasi dalam asset tidak langsung menghasilkan pendapatan
- c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Inter (SPI) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mahmudi (2010) pengertian system pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan sistem pengendalian intern berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
Kegiatan pemerintah dikatakan efektif bila ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya

tujuan. Sedangkan efisien dikaitkan dengan pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai standar (BPKP, 2009).

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Pengamanan asset Negara

Asset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Upaya pengamanan asset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan asset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013)

mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening system pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan (2010) menguji pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2008) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, menyatakan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Gerry (2013), menjelaskan bahwa system pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Semakin baik system pengendalian intern pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik pula.

6. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber

daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

b. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerinthan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

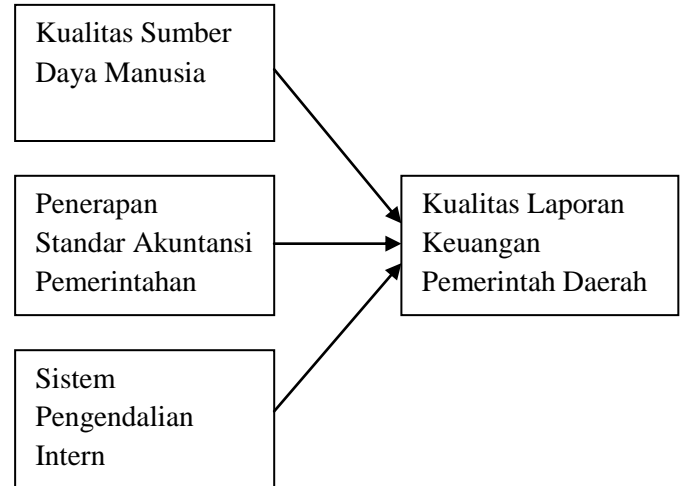
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menjalankan tugasnya (PP No. 24/2005).

c. Hubungan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai.

Apabila SPI dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, dan begitu pula sebaliknya, apabila penerapan SPI tidak berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik pula.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H2 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian yang berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kerinci berjumlah 24 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah 108 orang dari 24 SKPD yang terdapat di Kabupaten Kerinci.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari subjek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Kuncoro (2003) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Variabel Independen (X1, X2, dan X3)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel variabel independen adalah:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)
- b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)
- c. Sistem Pengendalian Intern (X3)

F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

H. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007).

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas penulis akan melakukan uji reliabilitas yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha's* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16.0. Sekaran (2006) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliabel
- b. 0.6-0.7 dapat diterima
- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

I. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah data *continue* berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, regresi, reliabilitas, uji t, korelasi dapat dilaksanakan. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong kiri atau ke kanan). Uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov smirnov* dengan melihat signifikansi pada taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1. Jika nilai $Sig \geq 0.05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- 2. Jika nilai $Sig < 0.05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 10 dan *tolerance* > 10 . Jika *tolerance value* dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel inde-penden.

Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%. Apabila signifikansi lebih dari 5% berarti tidak mengandung heterokedastisitas.

J. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RS = \frac{(5 SS) + (4 S) + (3 KS) + (2 TS) + (1 STS)}{15}$$

Dimana:

SS= Sangat Setuju

S = Setuju

KS= Kurang Setuju

TS= Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$TCR = \frac{Rata - Rata\ Skor}{5}$$

2. Metode Analisis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$AdjustedR^2 = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{N - 1}{N - k} \right]$$

Dari rumus diatas jelas bahwa:

1. Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
2. *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

3. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Peran Auditor Internal

e = error

b. Uji F (F – test)

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Jika F-hitung > F-tabel, maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika F-hitung < F-tabel, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

c. Uji t (Hipotesis)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

1. Jika $\text{sig} < \alpha$, t hitung > t tabel dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika $\text{sig} < \alpha$, t hitung > t tabel dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.

3. Jika $\text{sig} > \alpha$, t hitung $< t$ tabel, maka hipotesis ditolak.

K. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kerinci dengan menggunakan teknik *total sampling* untuk pengambilan sampel, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 24 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari dinas dan badan. Masing-masing SKPD terdiri dari 5 responden. Dari 24 SKPD tersebut, disebarkan sebanyak 120 kuesioner.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data SPSS didapat bahwa nilai seluruh variabel dari kolmogrov *smirnov* sebesar 1,100 dengan signifikan 0,177. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *variance inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) dengan nilai VIF 1.004, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

(X₂) dengan nilai VIF 1.003. Sistem Pengendalian Intern (X₃) dengan nilai VIF 1.006. Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁) dengan nilai *tolerance* 0,996 . Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₂) dengan nilai *tolerance* 0,997. System Pengendalian Intern (X₃) dengan nilai *tolerance* 0,994. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi atau semua variabel memiliki sig > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari heterokedastisitas.

C. Uji Model

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung}. Hipotesis diterima jika F_{hitung} > F_{tabel} dan nilai sig < α 0,05. Nilai F_{tabel} pada α 0,05 adalah 3,09. Nilai F_{hitung} adalah 26,980 sedangkan nilai sig adalah 0,000^a. Dengan demikian F_{hitung} > F_{tabel} dan nilai sig < α 0,05 yaitu 26,980 > 3,09 dan sig 0,000^a < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Regresi Berganda

Analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 2,111 + 0,515 (X_1) + 0,302 (X_2) + 0,129 (X_3) + e$$

Dimana:

X₁= Kualitas Sumber Daya Manusia

X₂= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X₃= Sistem Pengendalian Intern

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 2,111 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi Pemerintahan, dan system pengendalian intern adalah nol maka nilai tingkat penyerapan anggaran adalah sebesar konstanta (2,111).

b. Koefisien kualitas sumber daya manusia 0,515 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 0,515 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X₁ bernilai positif 0,515.

c. Koefisien sistem informasi sebesar 0,302 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,302 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X₂ bernilai positif 0,302.

d. Koefisien system pengendalian intern 0,129 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan system pengendalian intern satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,129 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X₃ bernilai positif 0,129.

3. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,451 Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan system pengendalian intern terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 45,1%, sedangkan 54,9% ditentukan oleh variabel lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Adapun variabel lain menurut teori yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, peran internal audit, pengeloan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dll.

UJI HIPOTESIS (*t test*)

Uji *t* statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k = 96-2 = 94$ adalah 0,1689.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 0,1689. Pada variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) nilai t_{hitung} adalah 6,729 dan nilai sig adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,729 > 1,661$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,515. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H₁ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 0,1689. Pada variabel kualitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) nilai t_{hitung} adalah 5,577 dan nilai sig adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,577 > 0,1689$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,302. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 0,1689. Pada variabel system pengendalian intern (X_3) nilai t_{hitung} adalah 1,389 dan nilai sig adalah 0,106. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,389 > 0,1689$ atau nilai signifikansi $0,168 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,129. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikansystem pengendalian intern (X_3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi hipotesis ketiga dari penelitian ini **ditolak**.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis,

ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rovyantie (2011), yang menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata kualitas sumber daya manusia dikategorikan baik dengan nilai 82,02%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 7 yaitu pengalaman dibutuhkan untuk spesifikasi pekerjaan, dengan tingkat capaian responden 79,6%, Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengalaman untuk spesifikasi pekerjaan.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah penting disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat dibandingkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah, dan Usman Bakar (2010) secara simultan

pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata penerapan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan baik dengan nilai 81,66%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 10 yaitu menyajikan dengan wajar peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut perlu dicatat, disajikan sesuai dengan substansi, realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya dengan tingkat capaian responden 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa lain perlu dicatat, disajikan dengan substansi, realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa system pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir dan Yuneita (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi) hasil hipotesis menunjukkan bahwa system pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai rata-rata system pengendalian intern di kategorikan baik dengan nilai 81,78%. Jika dilihat dari table distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 9 yaitu SKPD tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaian dengan capaian responden 80,2%. Seharusnya SKPD melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 45,1%. Sedangkan sisanya 54,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan

pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat banyak keterbatasan, karena pernyataan didalam kuesioner peneliti hanya menggunakan pernyataan yang bersifat normatif, sehingga responden diarahkan pilihan jawaban yang baik atau positif saja.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sumber daya manusia terutama pada aspek pengalaman yang dibutuhkan untuk spesifikasi pekerjaan, karena dari indikator menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya berpengalaman dalam spesifikasi pekerjaan karena memperoleh tingkat capaian responden terendah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai standar akuntansi pemerintahan karena pada indikator menunjukkan bahwa SKPD belum menyajikan dengan wajar transaksi

- yang seharusnya disajikan karena memperoleh tingkat capaian responden terendah.
3. Sistem pengendalian intern juga telah baik dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern karena pada indikator SKPD tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaian karena memperoleh tingkat capaian responden terendah.
 4. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, peran internal audit, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dll.
 5. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriawan, Vicky. 2010. Pengaruh Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Anwar Nasution. 2007. *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*. Jakarta : IAI-KSAP.
- Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Bukittinggi)*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No.1 (2013): Seri C.
- Azhar, Susanto. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: T. Lingga Jaya
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi. 2014. Opini LKPD Kabupaten Kerinci.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2009. *Modul Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Febriady Leonard Sembiring. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 1 2013.
- Galuh, Dellano. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hasan, Amir, Dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. JOM FEKON Vol. 1 Oktober 2014
- Mahmudi. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia
- Putri, Junita. 2008. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Silka, Hartina. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. *Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara*.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan daerah, Konsep dan Aplikasi, Cetakan Kedua*, Alfabeta Bandung.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Yuliani, Safrida., Nadirsyah dan Usman Bakar. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3. No. 2. Juli 2010
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. *Jurnal FE*. Universitas Negeri Padang.